

## Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pidie

**Rocky Saputra<sup>1)</sup> Ramzijah Ramzijah<sup>2)</sup> Syamsul Akmal<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jabal Ghafur  
email: [rockyputra659@gmail.com](mailto:rockyputra659@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jabal Ghafur  
email: [ramzijahsigli@gmail.com](mailto:ramzijahsigli@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jabal Ghafur  
email: [syamsul\\_akmal24@yahoo.com](mailto:syamsul_akmal24@yahoo.com)

Info Artikel	Abstrak
<p><i>Riwayat Artikel:</i></p> <p>Diterima: 15 Agustus 2024</p> <p>Direvisi: 20 September 2024</p> <p>Dipublikasikan: 30 September 2024</p> <hr/> <p><i>Nomor DOI</i></p> <p>10.47647/MAFEBIS.v2i2.590</p> <p><i>Cara Mensitasi :</i></p> <p>Saputra, R. Ramzijah. Akmal, S. 2024. Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pidie., 2(3). 24-38.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, dimana berupa data sekunder dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie dari rasio kemandirian daerah rata-ratanya 17,51% dimana kemampuan keuangan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah tergantung dari pemerintah pusat. Dari Rasio Efektivitas PAD rata-rata 84,48% dikategorikan tidak efektif ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Pidie memiliki kinerja kurang baik dalam merealisasikan PAD yang direncanakan. Dilihat dari Rasio Efisiensi rata-rata sebesar 100,13% dikategorikan tidak efisien dimana kinerja Pemerintah belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya, dan dilihat dari rasio keserasian, secara rata-rata belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal yaitu 56,36% berbanding 12,75%, berarti sebagian besar belanja daerah digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai, gaji PNS dan lain-lain, pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan pembangunan daerah.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</p>

Article Info	<i>Abstract</i>
<p><i>Article History :</i> Received: 15 Agustus 2024 Revised: 20 September 2024 Published: 30 September 2024</p>	<p><i>This research aims to determine the Financial Performance of the Regional Government of Pidie Regency, which is in the form of secondary data using quantitative descriptive research methods. The results of the research show that the financial performance of the Pidie Regency Government from the regional independence ratio is an average of 17.51% where the financial capacity to finance government implementation and regional development depends on the central government. From the average PAD Effectiveness Ratio of 84.48%, it is categorized as ineffective. It can be said that the Pidie Regency Government has performed poorly in realizing the planned PAD. Judging from the average Efficiency Ratio of 100.13%, it is categorized as inefficient where the Government's performance has not been able to reduce the amount of regional expenditure, and seen from the harmony ratio, on average operating expenditure is greater than capital expenditure, namely 56.36% versus 12.75%, meaning that the majority of regional spending is used to finance employee spending, civil servant salaries and so on, the government has not fully paid attention to regional development.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Regional Financial Performance, Regional Financial Ratios, and Ratios Regional Financial Independence</i></p>
<p><i>DOI Number :</i> 10.47647/MAFEBIS.v2i2.590</p> <p><i>How to cite :</i> Saputra, R. Ramziah. Akmal, S. 2024. <i>Analysis of Regional Financial Ratios to Assess Regional Financial Performance of Pidie Regency</i>, 2(3). 24-38.</p>	

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan.

Untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1 Postur APBK Kabupaten Pidie Tahun 2018 – 2022 (milyar rupiah)**

<b>POSTUR APBD</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.035,57</b>	<b>2.216,42</b>	<b>2.240,41</b>	<b>2.099,59</b>	<b>1.991,50</b>
-PAD	327,64	282,21	243,37	243,60	252,88
-TKDD	1.123,48	1.658,35	1.764,89	1.661,21	1.592,72
-Pendapatan Lainnya	584,44	275,85	232,15	194,78	145,91
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.202,72</b>	<b>2.250,07</b>	<b>2.252,29</b>	<b>2.103,09</b>	<b>2.081,12</b>
-Belanja Pegawai	861,51	847,72	854,07	789,37	789,09
-Belanja Barang dan Jasa	419,86	441,05	385,10	356,64	350,41
-Belanja Modal	289,46	318,67	263,94	241,08	270,68
-Belanja Lainnya	631,89	642,63	749,17	716,01	670,95
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-167,15</b>	<b>-33,65</b>	<b>-11,87</b>	<b>-3,50</b>	<b>-89,62</b>

**Sumber:** Sistem Informasi Keuangan Daerah-SIKD (data diolah, 2023)

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Pidie lebih besar diperoleh dari dana perimbangan atau dana transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya (PAD). Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pidie masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan menggali sumber asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Pidie sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Keserasian?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Pidie jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Pidie dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Pidie dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Pidie dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Pidie dari Rasio Keserasian.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Pidie dari Rasio Pertumbuhan.

## **STUDI KEPUSTAKAAN**

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut kamus akuntansi manajemen, “kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”

Kemudian menurut Manages et al. (2023) “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil yang telah dicapai dari penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah atas pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dengan menilai efisiensi (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022).

### **Tujuan Kinerja Keuangan Daerah**

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Marliani (2022) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### **Indikator Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Wulandari et al. (2023) terdapat 7 indikator kinerja:

- 1) Tujuan, menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama atasan atau bawahan.

- 3) Umpan Balik, merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
- 4) Alat atau Sarana, merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.
- 5) Kompetensi, merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 6) Motif, merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.
- 7) Peluang, perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak dan mengambil waktu yang tersedia.

### Rasio Keuangan Daerah

Menurut Mulyaningsih & Sunaningsih (2022) ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$RKKD = \frac{PAD}{Transfer Daerah} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Utari & Hadi (2020)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

### Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Keintjem & Murni, 2022). Rasio Rumus rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Ula & Bharata (2022), adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Permatasari & Trisnaningsih (2022) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	100% keatas
Efisiensi Berimbang	100%
Efisien	Kurang dari 100%

Sumber: (Siswanto & Maylan, 2022)

### Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

- 1) Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara Total Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Untuk rasio keserasian belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Pramono, 2019). Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah.

### **Rasio Pertumbuhan**

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Tumija et al., 2023). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>o</sub> = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Pihak yang berkepentingan dengan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan daerah adalah (Pramono, 2019):

- 1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- 2) Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 3) Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi



## Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

### Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie tahun 2018 – 2022. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan kuantitatif dari data APBD untuk mendapatkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi keuangan daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah, Kabupaten Pidie selama tahun 2018 – 2022 yang diperlukan oleh peneliti.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie selama tahun 2018 – 2022.
2. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie dengan mengukur rasio: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.
3. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie dengan indikator yang sesuai dengan teori.



4. Menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2018-2022.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan redistribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$RKKD = \frac{PAD}{Transfer Daerah} \times 100$$

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2018	237,201,958,015.66	1,098,033,955,156	21.60	Instruktif
2019	243,230,774,790.47	1,066,925,649,561	22.80	Instruktif
2020	214,947,831,017.48	1,088,354,736,341	19.75	Instruktif
2021	224,009,999,551.61	1,843,860,436,837	12.15	Instruktif
2022	198,555,860,790.91	1,734,006,142,899	11.45	Instruktif

Sumber : SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

Dilihat dari hasil perhitungan tabel 4.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Pidie tahun 2018 sampai tahun 2022 masih termasuk dalam kategori sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintahan pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong antara 0% dan 25%.

Rasio kemandirian yang masih sangat rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pidie dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Jadi, Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie secara keseluruhan dikatakan masih sangat rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

### Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efektifitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Penghitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2018	237,201,958,015.66	327,642,748,009	72.40	Tidak Efektif
2019	243,230,774,790.47	282,214,740,586	86.19	Tidak Efektif
2020	214,947,831,017.48	243,371,220,676	88.32	Tidak Efektif
2021	224,009,999,551.61	243,604,727,920	91.96	Tidak Efektif
2022	198,555,860,790.91	252,878,900,936	78.52	Tidak Efektif

Sumber : SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

Berdasarkan perhitungan tabel 4.2 di atas hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya kurang dari 100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Pidie dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.

Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD.

### **Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2018	1,981,012,635,468.00	1,937,580,207,531.68	102.24	Tidak Efisien
2019	2,121,009,904,350.34	2,153,273,014,352.45	98.50	Efisien
2020	2,048,417,690,990.96	2,058,619,033,986.48	99.50	Efisien
2021	1,992,338,629,432.17	2,112,611,434,388.61	94.31	Efisien
2022	2,079,527,944,203.22	1,959,652,666,426.54	106.12	Tidak Efisien

Sumber : SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

Hasil perhitungan tabel 4.3 di atas bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pidie tergolong Tidak Efisien karena rata-rata rasionya 100,13%. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Pidie dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

#### Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel 4.4, bahwa Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten pidie tahun 2018 sebesar 56.71% dan tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 57.31%. Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 53.43%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 56.44% dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali dari tahun sebelumnya menjadi 57.91% yang merupakan tertinggi selama 5 t

**Tabel 4.4**  
**Penghitungan Rasio Belanja Operasi Daerah Pemerintah**  
**Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2018	1,123,405,139,369.00	1,981,012,635,468.00	56.71
2019	1,233,977,818,994.30	2,153,273,014,352.45	57.31
2020	1,094,393,075,449.96	2,048,417,690,990.96	53.43
2021	1,124,424,323,022.11	1,992,338,629,432.17	56.44
2022	1,204,211,223,067.83	2,079,527,944,203.22	57.91

Sumber: SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Penghitungan Rasio Belanja Modal Daerah Pemerintah**  
**Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2018	271,087,485,994	1,981,012,635,468.00	13.68
2019	304,246,473,051	2,153,273,014,352.45	14.13
2020	222,779,490,581	2,048,417,690,990.96	10.88
2021	229,114,165,525	1,992,338,629,432.17	11.50
2022	281,470,248,686	2,079,527,944,203.22	13.54

Sumber: SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5 di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal.

Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal kecil atau belum terpenuhi.

Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Pidie diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

### **Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Hasil dari perhitungan Rasio Pertumbuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Penghitungan Rasio Pertumbuhan Daerah Kabupaten Pidie**  
**Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	PAD	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal
2018	-11.36%	-10.41%	-0.37%	-11.77%
2019	2.54%	11.13%	9.84%	12.23%
2020	-11.63%	-4.40%	-11.31%	-26.78%
2021	4.22%	2.62%	2.74%	2.84%
2022	-11.36%	-7.24%	7.10%	22.85%
<b>Rata-rata</b>	<b>-4.06%</b>	<b>0.53%</b>	<b>2.09%</b>	<b>2.79%</b>

Sumber: SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan Tahun 2023 (diolah).

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PAD mengalami fluktuatif dimana pertumbuhan pada tahun 2018 negatif -11.36% pada tahun 2019 tumbuh sebesar 2,5% dan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -11,63%, pada tahun 2021 tumbuh menjadi 4,22% dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif yang sangat signifikan sebesar -11,36. Rata-rata pertumbuhan PAD dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar -4,06%.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pidie pada tahun 2018 sebesar -10,41%, pada tahun 2019 sebesar 11,13%, ini merupakan pertumbuhan pendapatan yang sangat tinggi selama tahun 2018 – 2022. Kemudian pada tahun 2020 turun sebesar 4,40% dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 2,62%. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,24%. Secara rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Pidie dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 0,53%.

Rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 2,09%, dimana pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,84%, sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2020 yaitu negatif 11,31%. Sedangkan untuk belanja modal rata-rata tumbuh sebesar 2,79%, dimana pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 22,85% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar negatif 26,78%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang di ukur melalui rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian yang masih sangat rendah terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie bergantung dengan pemerintah pusat.
2. Untuk rasio efektivitas PAD dikatakan sudah tidak baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie belum mampu dalam mencapai target untuk pendapatan asli daerah tersebut.
3. Untuk rasio efisiensi dikatakan buruk karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

4. Untuk rasio keserasian dikatakan buruk karena pengeluaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil, dana pemerintah daerah yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.
5. Dan untuk tingkat rasio pertumbuhannya negatif, karena nilai Total Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai Belanja Modal semakin rendah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Keintjem, V. A., & Murni, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017- 2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 953–962. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i1.38525>
- Manages, R., Wardani, Y. D., & Wardani, H. P. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2022. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.8734/musytari.v2i2.871>
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *Jsma: Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 11(20), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Mulyaningsih, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . *Jisamar: Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>
- Permatasari, D. A., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jiubj: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573–1582. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Pramono, J. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Among Makarti, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga*, 7(1), 83–112. <https://doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>
- Siswanto, S., & Maylan, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manjemen*, 11(1), 130–138. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Tumija, T., Hakiki, D., & Agustina, I. (2023). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. *JEKP: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 10(1), 56–78. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3227>
- Ula, N. N., & Bharata, R. W. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Apbd Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020). *Jurnal Transekonomika, Transpublika Publisher, Volume 2(Issue 5)*, 405–413. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/151>

- Utari, S., & Hadi, Moh. M. (2020). Gaya Kepemimpinan Demokratis Perpustakaan Kota Yogyakarta (Studi Kasus). *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1), 994–1002. <https://doi.org/10.20961/jpi.v6i1.41095>
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>